

Determinasi Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Alfalink Intan Agustin¹, Victoria Ari Palma Akadiati^{2*}, Matheus Edwin³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias

* vicaripalma23@gmail.com (email: korespondensi)

Abstract. Based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning village financial management, good village fund management is managed based on the principles of transparency, accountability, and participation. Of the three principles, it aims to minimize fraud and be able to run a good village government system. Therefore, this study was conducted with the aim of being able to determine the effect of transparency, accountability and community participation on village fund management in Gunung Pasir Jaya Village, Sekampung Udik District, East Lampung Regency. With a sample of 369 respondents, namely the village community. The method used is purposive sampling. In this study the data collected through the distribution of questionnaires with the hypothesis test used is multiple linear regression analysis. The results of the data show that transparency, accountability and community participation have a positive and significant effect on village fund management. This shows that there is an interplay between the principles of transparency (openness) associated with the application of accountability (accountability) of the village government to the community towards the management of village funds. **Keywords:** Transparency, Accountability, Community Participation, Village Fund Management.

1. Pendahuluan

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu desa merupakan salah satu unit penting yang harus mendapat perhatian dari pemerintahan suatu Negara, karena desa menjadi salah satu indikator demokrasi dalam penyampaian aspirasi suara dimana entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat yang dapat berpengaruh terhadap kuat dan lemahnya perekonomian suatu daerah atau bahkan negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 [1] yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa (pasal 71 ayat 2). Sejak diterbitkannya peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 dan seterusnya, pemerintah di Indonesia akan memberikan alokasi dana desa (ADD) dengan nilai yang meningkat dari tahun ke tahun.

Beberapa penelitian sebelumnya yakni dalam penelitian (Amalia, n.d.) [2] tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa disimpulkan bahwa secara parsial variabel transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif baik dalam pengelolaan keuangan maupun pembangunan desa sehingga dapat mengontrol pembangunan desa. Penelitian (Desa et al., 2022) [3] yang dilakukan pada Desa Bulo penerapan akuntabilitas dan pengelolaan dana desa termasuk kurang baik. Penelitian (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) [4] yang dilakukan pada desa di kabupaten Garut menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Fenomena gab penelitian atau ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menjadikan peneliti melakukan penelitian menggunakan variable transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat apakah berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa Gunung Pasir Jaya. Dalam pengalokasian dana desa, di desa Gunung Pasir Jaya merupakan salah satu desa yang menerima kucuran dana desa Rp915.087.000,00 pada tahun 2019 tercantum dalam baleho di balai desa setempat.

Serapan dana desa pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dengan realisasi dana desa sebesar Rp 20,8 triliun atau seratus persen (100%) dari target APBN. Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang diharapkan dapat mengoptimalkan seluruh skema alokasi anggaran dari pemerintah kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pembangunan desa adalah wujud Nawa Cita ke-3 Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI [5]. UU Nomor 6 tahun 2014 mengatur bahwa desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (2014,2016) [1]. Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa seluruh Indonesia berdasarkan data dari badan pusat statistic sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2016 – 2018

Pendapatan - Belanja	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah)		
	2016	2017	2018
I. PENDAPATAN	82.311.844.142	100.240.294.971	102.128.107.423
1. Pendapatan Asli Daerah	3.535.279.704	3.097.424.017	3.475.029.612
2. Pendapatan Transfer	78.304.077.559	96.651.289.390	97.958.642.715
2.1. Dana Desa	45.612.678.304	57.560.788.555	56.902.917.435
2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	2.042.110.731	2.465.746.015	3.002.805.130
2.3. Alokasi Dana Desa	26.372.112.293	30.507.062.177	31.823.027.336
2.4. Bantuan Keuangan	4.277.176.231	6.117.692.643	6.229.892.814
Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	472.486.879	491.581.564	694.435.096

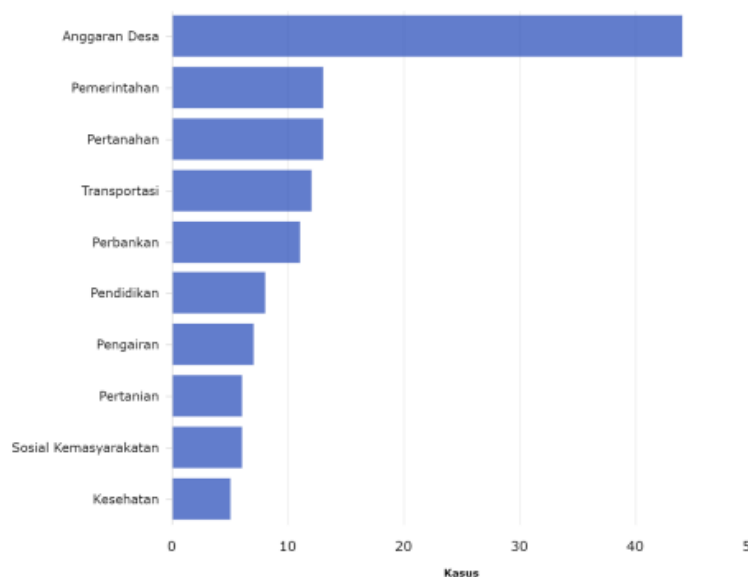
II. BELANJA	80.800.750.832	97.083.450.501	98.750.651.154
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	25.871.393.420	27.729.209.218	29.628.230.791
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	44.697.632.407	55.784.382.121	53.875.221.520
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	3.928.403.467	4.931.290.074	5.441.800.096
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5.095.330.199	8.163.819.223	9.290.657.247
5. Bidang Tak Terduga	1.207.991.339	474.749.865	514.741.500

Sumber: BPS, Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa

Alokasi dana desa mengalami kenaikan dalam setiap tahun yang membawa pengaruh positif terhadap desa, seperti tersedianya infrastruktur desa yang memadai yaitu penyediaan pos kesehatan serta pembangunan jalan desa, dan sebagainya. Dampak atau pengaruh positif tersebut dapat juga membawa permasalahan yang serius serta menimbulkan tantangan terhadap suatu desa. Permasalahan yang muncul adanya penyalahgunaan anggaran dana desa oleh pengelola dana desa dalam hal ini yaitu perangkat desa atau bahkan kepala desa. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* telah mencatat sebanyak 169 kasus korupsi selama semester pertama di tahun 2020 dengan jumlah korupsi terbanyak di sector anggaran dana desa yaitu 44 kasus (Bayu, 2020) [6]. Berikut ini adalah korupsi berdasarkan sector selama semester pertama di tahun 2020:

Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 169 kasus korupsi selama semester I/2020. Dari jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus. Sektor pemerintahan dan pertanahan menyusul dengan masing-masing 13 kasus korupsi. Korupsi di sektor transportasi sebanyak 12 kasus selama semester I/2020. Sedangkan, korupsi di sektor perbankan mencapai 11 kasus selama enam bulan terakhir. (Baca: Inilah 10 Negara Terkorup di Dunia)



Gambar 1. Korupsi Berdasarkan Sector Selama Semester Pertama di Tahun 2020

Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW), 29 September 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dari keempat asas tersebut memiliki tujuan agar dapat meminimalisir kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Tiga dari asas yang diungkapkan oleh Permendagri tersebut merupakan karakteristik yang juga diterapkan dalam upaya peningkatan *good governance* menurut *United Nation Development programme* (UNDP), diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Mardiasmo, 2018:32-33).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Mahsun, dkk 2015:32). Transparansi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa mengenai program serta kebijakan yang sedang dilakukan atau telah dilakukan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011:89).

Berikutnya asas partisipasi, partisipasi publik dapat diartikan sebagai proses di mana masyarakat dengan kepentingannya mempengaruhi pengendalian atas inisiatif pembangunan, keputusan, dan sumber daya yang mempengaruhi masyarakat tersebut (Bastian, 2015:118). Keterlibatan masyarakat dapat berpengaruh sangat penting, keterlibatan tersebut dapat dimulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

2. Metode Penelitian

2.1. Persiapan sampel

Data dikumpulkan dengan membagikan kuisioner secara langsung kepada responden yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan yang ditujukan kepada masyarakat Desa Gunung Pasir Jaya yang telah memenuhi hak pilih atau telah berusia 17 tahun ke atas. Penyebaran kuisioner tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 20 Juni 2020. Responden yang telah diambil sebanyak 369 orang dengan karakteristik responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Berdasarkan jenis kelamin di Desa Gunung Pasir Jaya adalah:

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Perempuan	201	54,00%
Laki-Laki	168	46,00%
Jumlah	369	100,00%

Berdasarkan data kelompok usia sebagai di Desa Gunung Pasir Jaya adalah berikut:

Tabel 3. Usia Responden

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Responden	Persentase (%)
17-30	142	38,48%
31-45	138	37,40%
45-60	81	21,95%
> 60	8	2,17%
Jumlah	369	100,00%

Berdasarkan kelompok pekerjaan masyarakat di Desa Gunung Pasir Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Petani	136	36,86%
Karyawan (PNS/Swasta/TNI/Polri)	91	24,66%
Wiraswasta	120	32,52%
Jasa	22	5,96%
Jumlah	369	100%

Berdasarkan kelompok pendidikan masyarakat desa Gunung Pasir Jaya adalah sebagai berikut:

Tabl 5. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
SD	68	18,43%
SMP	70	18,97%
SMA	193	52,30%
Diploma	8	2,17%
Sarjana	30	8,13%
Jumlah	369	100%

2.2 Pengujian Kuesioner

Uji Validitas

Untuk mengukur validitas suatu data peneliti menggunakan pengolahan data dari program SPSS.

Tabel 6. Uji Validitas Variabel Transparansi Correlations

Butir	Nilai Total Pearson Correlation	Sig.	r tabel	Kriteria
1	0,545	0,001	0,3061	Valid
2	0,697	0,000	0,3061	Valid
3	0,653	0,000	0,3061	Valid
4	0,547	0,001	0,3061	Valid
5	0,404	0,013	0,3061	Valid

6	0,628	0,000	0,3061	Valid
7	0,814	0,000	0,3061	Valid
8	0,463	0,005	0,3061	Valid
9	0,431	0,009	0,3061	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah

Hasil pernyataan pada variabel transparansi dinyatakan valid yaitu lebih besar dari r table sebesar 0,3061. Penjelasan data pada total pearson correlation hasil nilai r hitung variabel transparansi dari ke 9 item pernyataan pada variabel transparansi lebih besar dari 0,3061.

Tabel 7. Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Correlations

Butir	Nilai Total Pearson Correlation	Sig. (1-tailed)	r _{tabel}	Kriteria
1	0,610	0,000	0,3061	Valid
2	0,691	0,000	0,3061	Valid
3	0,851	0,000	0,3061	Valid
4	0,716	0,000	0,3061	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Semua pernyataan pada masing-masing item variabel akuntabilitas telah valid yaitu lebih besar dari r tabel 0,3061. Penjelasan tersebut dapat diketahui dari nilai total pearson Correlation hasil nilai r hitung dimana pernyataan 1 sebesar 0,610, pernyataan 2 sebesar 0,691, pernyataan 3 sebesar 0,851, dan pernyataan 4 sebesar 0,716.

Tabel 8. Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat Correlations

Butir	Nilai Total Pearson Correlation	Sig. (1-tailed)	r _{tabel}	Kriteria
1	0,858	0,000	0,3061	Valid
2	0,772	0,000	0,3061	Valid
3	0,621	0,000	0,3061	Valid
4	0,674	0,000	0,3061	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua pernyataan pada variabel partisipasi masyarakat dinyatakan valid karena r hitung lebih besar > dari r t tabel sebesar 0,3061. Data menunjukkan bahwa nilai r hitung item 1 sebesar 0,858, item 2 sebesar 0,772, item 3 sebesar 0,621, dan item 4 sebesar 0,674.

Tabel 9. Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa Correlations

Butir	Nilai Total		r _{tabel}	Kriteria
	Pearson Correlation	Sig. (1-tailed)		
1	0,606	0,000	0,3061	Valid
2	0,733	0,000	0,3061	Valid
3	0,393	0,016	0,3061	Valid
4	0,686	0,000	0,3061	Valid
5	0,603	0,000	0,3061	Valid
6	0,648	0,000	0,3061	Valid
7	0,576	0,000	0,3061	Valid
8	0,475	0,004	0,3061	Valid
9	0,444	0,007	0,3061	Valid
10	0,672	0,000	0,3061	Valid
11	0,377	0,020	0,3061	Valid
12	0,646	0,000	0,3061	Valid
13	0,674	0,000	0,3061	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Seluruh pernyataan untuk masing-masing item variabel pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari > r tabel 0,3061 valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji *reliable* atau handal atau konsisten tidaknya jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuisioner. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilaksanakan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α), dimana nilai dari α tersebut dengan interpretasi koefisien reliabilitas digunakan kategori bila interval koefisien 0,00 – 0,199 tingkat hubungan sangat rendah, 0,20 – 0,399 tingkat hubungan rendah, 0,40 – 0,599 tingkat hubungan sedang, 0,60 – 0,799 tingkat hubungan kuat, 0,80 – 1,000 tingkat hubungan sangat kuat. Berikut hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini.

Tabel 10. Reliability Statistik Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Transparansi	0,743	9
Akuntabilitas	0,693	4
Partisipasi Masyarakat	0,679	4
Pengelolaan Dana Desa	0,836	13

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Diketahui bahwa nilai alpha (α) dari variabel transparansi adalah sebesar 0,743, nilai alpha (α) dari variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,693, variabel partisipasi masyarakat adalah sebesar 0,679 dan nilai alpha (α) dari variabel pengelolaan dana desa adalah sebesar 0,836. Hasil *Cronbach Alpha* dari variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat tersebut telah menunjukkan bahwa berada diantara 0,60 – 0,799 tingkat hubungan kuat, sedangkan pada variabel pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa nilainya 0,80 – 1,000

maka tingkat hubungan sangat kuat. Seluruh item reliabel dan seluruh tes konsisten secara internal karena memiliki nilai reliabilitas yang cukup kuat.

2.3 Metode penelitian dan Analisis

Statistik Deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yaitu variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maksimum, dan minimum. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan variabel pengelolaan dana desa. Berikut adalah hasil tabel pengujian statistik deskriptif:

Tabel 11. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std.	Skewness	Kurtosis		
					Deviation		Std. Error	Statistik	Std. Error
Transparansi	369	30	45	38,48	2,734	-0,322	0,127	0,240	0,253
Akyntabilitas	369	12	20	16,54	1,385	0,026	0,127	-0,041	0,253
Partisipasi	369	12	20	16,11	1,486	-0,142	0,127	1,089	0,253
Pengelolaan Dana Desa	369	40	65	54,80	3,360	-0,233	0,127	1,011	0,253
Valid N (listwise)	369								

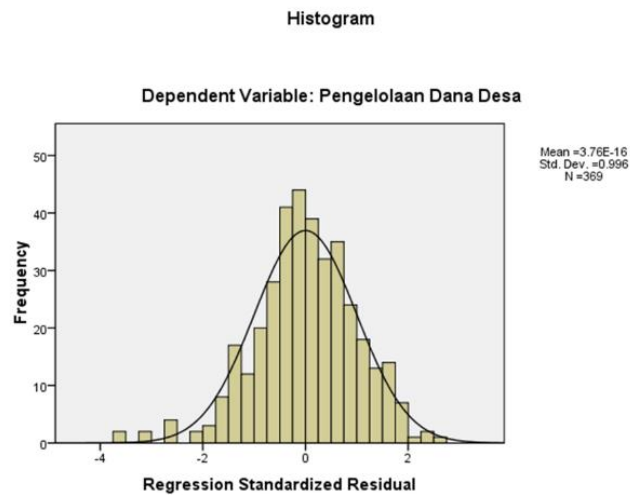
Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Dengan jumlah responden 369 masyarakat Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur hasil output pengolahan data menunjukkan bahwa untuk variabel transparansi angka rata-rata (mean) sebesar 38,48 memiliki nilai maksimum sebesar 45 dan nilai minimum sebesar 30 dengan standar deviasi 2,734. Variabel akuntabilitas memiliki nilai maksimum sebesar 20 dan nilai minimum sebesar 12 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 16,54 dengan standar deviasi 1,385. Variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai maksimum sebesar 20 dan nilai minimum sebesar 12 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 16,11 dengan standar deviasi 1,486. Variabel pengelolaan dana desa atau disebut juga dengan variabel dependen pada tabel di atas memiliki nilai maksimum sebesar 65 dan nilai minimum sebesar 40 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 54,80 dengan standar deviasi 3,360.

Nilai skewness dan kurtosis masing-masing untuk variabel transparansi yaitu -0,322/0,240, untuk variabel akuntabilitas yaitu 0,026/-0,041, untuk partisipasi masyarakat yaitu -0,142/1,089, dan untuk variabel pengelolaan dana desa yaitu -0,233/1,011 sehingga dapat disimpulkan dari nilai *skewness* dan *kurtosis* bahwa data variabel transparansi, partisipasi dan pengelolaan dana desa menunjukkan hasil *skewness* negative dan *kurtosis* positif, artinya distribusi data miring ke kiri distribusi normal dan meruncing. Untuk variabel akuntabilitas, nilai *skewness* positif dan *kurtosis* negatif, artinya distribusi miring kekanan distribusi normal dan melandai.

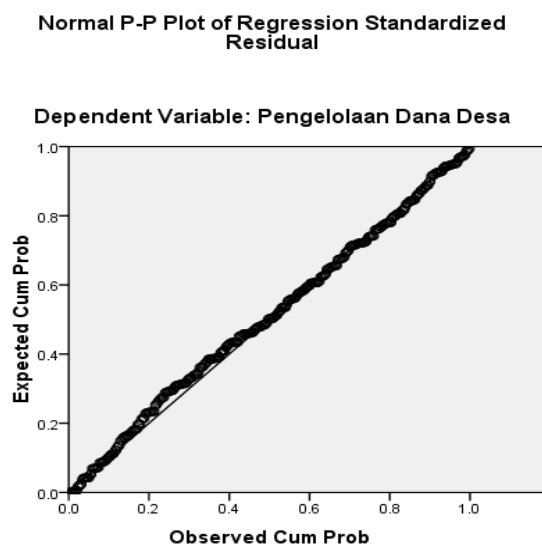
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah model regresi dan variabel residual mempunyai distribusi normal atau diambil dari populasi normal sehingga data menjadi valid. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan dua tahap yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*. Berikut adalah uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik:



Gambar 2. Grafik Histogram Uji Normalitas

Grafik histogram pada uji normalitas menunjukkan bahwa distribusi penyebaran residual yang normal dengan grafik tidak menunjukkan arah yang cenderung ke kanan ataupun ke kiri. Selain dari grafik di atas, uji normalitas data ini juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal plot di bawah ini.



Gambar 3. Grafik Plot Uji Normalitas

Dari gambar grafik normal plot terlihat bahwa sebaran nilai residual yang dilambangkan dengan titik atau lingkaran kecil tersebar disekeliling garis diagonal dan mengikuti arahnya. Apabila residual berasal dari distribusi yang normal, maka nilai sebaran terletak disekitar garis lurus. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil data residual tersebut adalah normal atau dapat dikatakan telah terpenuhi. Dalam penelitian ini juga menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 12 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		369
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,657122
Most Extreme Differences	Absolute	0,048
	Positive	0,023
	Negative	-0,048
Kolmogorov-Smirnov Z		0,928
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,356

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai sebesar 0,048 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,356. Data residual telah terdistribusi normal dengan nilai signifikan lebih dari > 0,05.

Uji Multikolinieritas.

Uji *Multikolinieritas* dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak terjadi korelasi antara variabel independennya. Hasil uji *Multikolinieritas* dalam penelitian ini:

Tabel 13 Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1 (Constant)	23,656	2,575		9,187	0,000			
Transparansi	0,163	0,051	0,133	3,174	0,002	0,984	1,017	
Akuntabilitas	0,662	0,124	0,273	5,331	0,000	0,664	1,528	
Partisipasi	0,865	0,116	0,383	7,432	0,000	0,646	1,548	

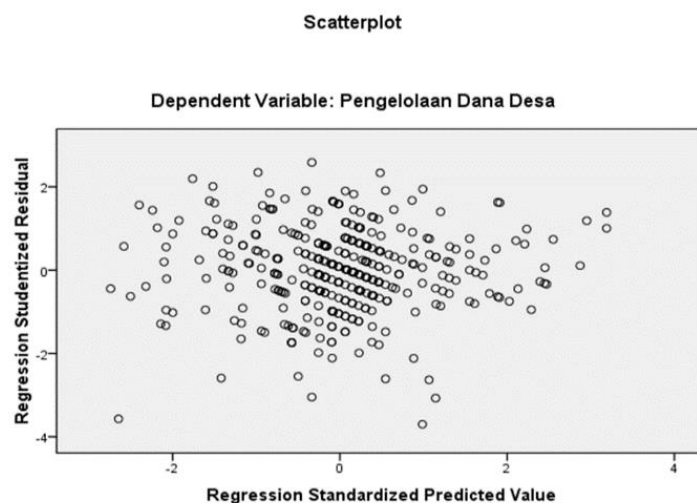
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel hasil dari uji Multikolinieritas diketahui bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh dari masing-masing variabel yaitu lebih dari > 0,10. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh ketiga variabel tersebut adalah, variabel transparansi (X1) sebesar 0,984, variabel akuntabilitas (X2) sebesar 0,654, dan variabel partisipasi masyarakat (X3) sebesar 0,646 artinya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Pada pendekatan multikolinearitas juga dapat dilihat melalui nilai *variance inflation factors* (VIF). Nilai VIF dalam penelitian ini adalah sebesar 1,017 untuk variabel transparansi, variabel akuntabilitas 1,528 dan variabel partisipasi masyarakat 1,548. Ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari $< 10,00$ tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel *independent* dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi penelitian ini terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain, penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang *homoskedastisitas* atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil pelaksanaan uji *heteroskedastisitas*.



Gambar 4. Uji *Heteroskedastisitas*

Hasil uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan grafik *scatterplot* terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Sehingga dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi dalam penelitian ini dan layak digunakan untuk memprediksi pengelolaan dana desa dengan menggunakan variabel independennya yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Uji Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis sejauh mana pengaruh variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di desa Gunung Pasir Jaya kecamatan Sekampung Udik.

Tabel 14. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23,656	2,575		9,187	0,000
Transparansi	0,163	0,051	0,133	3,174	0,002
Akuntabilitas	0,662	0,124	0,273	5,331	0,000
Partisipasi	0,865	0,116	0,383	7,432	0,000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh koefisien variabel bebas X1 (transparansi) sebesar 0,163, koefisien variabel X2 (akuntabilitas) sebesar 0,662, dan koefisien variabel X3 (partisipasi masyarakat) sebesar 0,865. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 23,656 + 0,163 X_1 + 0,662 X_2 + 0,865 X_3 + e$$

Keterangan:

X1 = transparansi

X2 = Akuntabilitas

X3 = partisipasi

Y = pengelolaan Dana Desa

e = standart error/Residual

Nilai koefisien pada variabel transparansi (X_1) adalah sebesar 0,163 artinya bahwa apabila terjadi kenaikan transparansi sebesar 1 satuan, maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,163. Nilai koefisien pada variabel akuntabilitas (X_2) sebesar 0,662 bahwa apabila terjadi kenaikan akuntabilitas sebesar satu satuan, maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,662. Nilai koefisien pada variabel partisipasi masyarakat (X_3) adalah sebesar 0,865 bahwa apabila terjadi kenaikan partisipasi masyarakat sebesar satu satuan, maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,865.

Uji Hipotesis Secara Parsial/individu (Uji t)

Hasil perhitungan uji statistik t dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan $Df = 369 - 4 = 365$, t tabel sebesar 1,966. Hasil menunjukkan t hitung \geq t tabel yaitu sebesar $3,174 \geq 1,966$ pada variabel transparansi, untuk variabel akuntabilitas $5,331 \geq 1,966$ dan untuk variabel partisipasi masyarakat $7,432 \geq 1,966$ dengan signifikansi kurang dari 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Gunung pasir jaya kecamatan Sekampung Udik.

Variabel transparansi hasil uji data diperoleh nilai t hitung dalam variabel transparansi ini sebesar 3,174 dan nilai t tabel adalah sebesar 1,966 dengan nilai signifikannya sebesar 0,002. Hipotesis pada penelitian ini yaitu H1 menyatakan bahwa pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa diterima.

Variabel akuntabilitas dengan hipotesis H2 menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa diterima dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 5,331 dan nilai t tabel sebesar 1,966 dengan nilai signifikan 0,000.

Variabel partisipasi masyarakat hipotesis H3 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa diterima, dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 7,432 dan nilai t tabel sebesar 1,966 dengan nilai signifikan sebesar 0,000

Pengujian hipotesis secara bersama (uji F)

Uji statistik F ini dengan tujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Hasil dari uji statistik F dalam tabel berikut ini:

Tabel 15. Uji Statistk F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	1.555.763	3	518.588	72,852	0,000 ^a
	Residual	2.598.189	365	7.118		
	Total	4.153.951	368			

- a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas
- b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Tabel output ANOVA atau F test diperoleh nilai F hitung sebesar 72,852 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,629 dan nilai signifikansi menunjukkan nilai yang kurang dari < 0,05. Maka, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan dana desa. Hipotesis H4 diterima yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur pengaruh kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independent (X) secara stimultan mempengaruhi variable dependen (Y) sebagai sumbangan pengaruh atau kontribusi pengaruh secara bersama-sama yang dapat dilihat dari nilai *adjusted R-Squared*. Berikut adalah hasil uji Koefisien Determinasi R² pada tabel dibawah ini:

Tabel 16. Koefisien Determinasi *Adjusted R²*

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	A djusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,612 ^a	0,375	0,369	2,668

- a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas
- b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Output SPSS penelitian ini dari model summary diketahui koefisien determinasi sebesar 0,375. Nilai tersebut berasal dari pengkuadratan nilai R, yaitu 0,612 x 0,612 = 0,375 atau sama dengan 37,5%. Hal tersebut berarti bahwa dari ketiga variabel independen yaitu, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 37,5% . Sedangkan yang sisanya sebanyak 62,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau di luar variabel yang tidak diteliti.

3 Hasil penelitian dan Pembahasan

3.1. Pembahasan

Hasil hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa H1 yaitu pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa diterima, transparansi adalah salah satu syarat penting dalam mengelola dana desa. Didukung hasil jawaban responden dengan jawaban setuju dan sangat setuju pada setiap item pernyataan yang disediakan dalam kuisioner. Hasil penelitian mengenai transparansi ini ditunjukkan oleh pemerintah desa dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa. Pemerintah desa juga telah menyediakan informasi penting yang berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan. Informasi ditempel di papan pengumuman ataupun baleho maupun spanduk serta adanya website atau media publikasi organisasi yang dapat di akses secara umum. Dengan adanya sistem pemerintahan yang transparan serta didukung dengan keterlibatan masyarakat desa dalam musyawarah desa, maka segala program dan visi misi desa akan dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan. Berdasarkan hasil uji data yang telah dilaksanakan diperoleh nilai t hitung dalam variabel transparansi ini sebesar sebesar 3,174 dan nilai t tabel adalah sebesar 1,649 dengan nilai signifikannya sebesar 0,002 dimana nilai signifikannya tidak lebih besar dari 0,05. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilaksanakan penelitian (Amalia, n.d.) [2] menyatakan bahwa transparansi secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Hasil hipotesis H2 yaitu pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa diterima selanjutnya hasil analisis menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Dalam pelaksanaannya akuntabilitas dilaksanakan oleh pemerintah melalui pemasangan spanduk pengumuman yang berisikan grafik anggaran pendapatan dan belanja untuk satu periode pemerintahan di balai desa. Serta adanya pembagian informasi tentang keluar masuknya iuran dana sosial dan uang jimpitan kepada setiap masyarakat desa Gunung Pasir Jaya kecamatan Sekampung Udik. Berdasarkan uji hipotesis yang dilaksanakan dalam penelitian ini, diperoleh hasil nilai t hitung sebesar 5,331 dan nilai t tabel sebesar 1,649 dengan nilai signifikan 0,000 atau kurang dari $< 0,05$. Hasil kinerja pemerintah desa dapat dilihat melalui pembuatan realisasi dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta timbal balik atau hasil dari pengelolaan dana desa yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Kepatuhan pemerintah juga melalui prosedur dan hukum yang dapat mendorong terciptanya pemerintah yang bersih dari korupsi. Sehingga, diharapkan kepada pemerintah desa untuk selalu dapat mematuhi segala prosedur, hukum, dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Agustiana, 2020) [7] bahwa akuntabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Hasil hipotesis H3 yaitu pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa diterima. Partisipasi masyarakat berperan penting dilaksanakan sebagai upaya dalam mewujudkan segala program desa yang didukung melalui keuangan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara langsung dalam pengelolaan dana desa yang dikuatkan dengan hasil uji hipotesis untuk variabel partisipasi masyarakat dengan menggunakan uji statistik dengan nilai t hitung sebesar sebesar 7,432 dan nilai t tabel sebesar 1,649 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau kurang dari $< 0,05$. Hasil uji hipotesis tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan dalam pengelolaan dana desa. Bentuk dari upaya partisipasi masyarakat yang dilaksanakan pemerintah desa yaitu dengan adanya musyawarah bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh desa, adanya gotong royong dalam pembangunan dan pelestarian desa dan kegiatan lainnya. Hasil penelitian ini juga mendukung

penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Putra & Rasmini, 2019) [8] partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Abiansemal berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil uji hipotesis pada keseluruhan variabel menunjukkan bahwa F hitung pada masing-masing variabel independen lebih besar dari $> F$ tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 yaitu transparansi (X1), akuntabilitas (X2), partisipasi masyarakat (X3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Y).

4 Kesimpulan

Hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 369 orang bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian mengenai transparansi ini ditunjukkan oleh pemerintah desa dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa. Pemerintah desa juga telah menyediakan informasi penting yang berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan. Informasi ditempel di papan pengumuman ataupun baleho maupun spanduk serta adanya website atau media publikasi organisasi yang dapat di akses secara umum. Dengan adanya sistem pemerintahan yang transparan serta didukung dengan keterlibatan masyarakat desa dalam musyawarah desa, maka segala program dan visi misi desa akan dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan. Adanya pembagian informasi tentang keluar masuknya iuran dana sosial dan uang jimpitan kepada setiap masyarakat menunjukkan telah terlaksananya akuntabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin transparan (terbuka) pemerintah desa dan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin baik tingkat pengelolaan dana desa. Serta semakin akuntabilitas pemerintah desa maka semakin baik tingkat pertanggungjawaban tata kelola terhadap pengelolaan dana desa.

5 Referensi

- [1] U.-U. R. I. N. 6 T. 2014, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *ACM Int. Conf. Proceeding Ser.*, vol. 18-April-2, no. 1, pp. 45–54, 2016.
- [2] R. S. Amalia, “the Influence of Transparency , Accountability , and Society Participation in Rural Financial Management Towards Rural”.
- [3] M. Desa, P. Serai, and L. Perspektif, “NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Perpajakan,” vol. 9, no. 4, pp. 1483–1490, 2022.
- [4] F. Sukmawati and A. Nurfitriani, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut),” *J. Ilm. Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*, vol. 2, no. 1, pp. 52–66, 2019.
- [5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Buku Pintar Dana Desa,” *Kementeri. Keuang. Republik Indones.*, p. 113, 2017, [Online]. Available: <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- [6] D. J. Bayu, “Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020,” *Indones. Corrupt. Watch*, no. September, p. 2020, 2020, [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020>
- [7] V. Agustiana, “Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan

keuangan alokasi dana desa pada desa gunungbatu,” *J. Mhs. Akunt.*, vol. 1, pp. 1–20, 2020, [Online]. Available:

<https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/JMA/article/download/113/100>

- [8] I. M. Y. D. Putra and N. K. Rasmini, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 28, p. 132, 2019, doi: 10.24843/eja.2019.v28.i01.p06.

Buku:

Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Bastian, I. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.

Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi: Yogyakarta.

Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga Cetakan Kelima. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.